

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang dikumpulkan mengenai kewenangan salah satu Lembaga Negara yang bertugas mengawasi Penyiaran di Daerah atau disingkat dengan KPID dalam hal ini adalah KPID Riau yang berperan serta mengawasi penyiaran di daerah Kabupaten Bengkalis dalam pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2015 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau tidak melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawasan terhadap Radio yang menyiarkan iklan pilkada di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh letak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Provinsi dan telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Panwas. Seharusnya KPID Riau melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawasan karena Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki kewenangannya sendiri sebagai lembaga yang memfasilitasi iklan kampanye sedangkan Panitia Pengawas bertugas hanya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Sanksi administratif yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau terhadap radio yang menyiarkan iklan pilkada tidak sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prosedur dalam Undang-undang penyiaran. Didalam undang-undang penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau memiliki kewenangan salah satunya menetapkan standar program siaran. Didalam Standar Program Siaran dijelaskan bahwa sanksi-sanksi yang di harus dijatuhkan berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran serta pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Dan jangka waktu pengenaan sanksi administratif antara teguran tertulis pertama dan kedua minimal 7 hari kalender kerja. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis sekaligus mengeksekusi seluruh iklan pilkada yang disiarkan oleh Radio. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur dalam undang-undang penyiaran.

2. KPID Riau dalam melakukan pengawasan memiliki faktor penghambat seperti: Letak Geografis, Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Segi Peraturan, Komunikasi, Kurangnya Pengetahuan Pemilik Lembaga Penyiaran dalam menganalisa dan memahami undang-undang dan peraturan penyiaran

B. Saran

Adanya lembaga negara tidak terlepas dari keberadaan negara secara historis. Lembaga-lembaga negara berperan dalam membangun negara agar tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Lembaga-lembaga negara yang independen seperti KPK, KPU dan KPI. Khusus Lembaga Penyiaran Indonesia (KPI), di daerah disebut KPID yang tugas dan kewenangannya sama diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Namun, yang membedakannya adalah jika KPI berada di Pusat membahas Penyiaran secara Nasional, sedangkan KPID membahas secara regional

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang penulis kemukakan, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk penelitian ini, saran-saran tersebut adalah:

1. KPID Riau harus mengawasi lembaga penyiaran tidak hanya terbatas pada Provinsi melainkan di kabupaten maupun kecamatan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.
2. KPID Riau harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya di provinsi melainkan juga di kabupaten dan kecamatan agar masyarakat mengetahui bahwasanya ada lembaga negara yang mengawasi siaran lembaga penyiaran yaitu KPID Riau dan agar tidak terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum terutama peraturan tentang penyiaran
3. KPID Riau harus lebih teliti dalam menjatuhkan sanksi administratif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
4. Pemerintah Baik Pusat maupun Daerah harus memfasilitasi KPID Riau sehingga tidak kekurangan dana untuk menjalankan peran dalam melakukan pengawasan di Kabupaten maupun Kecamatan karena letak geografis daerah-daerah yang ada di Riau melewati dua jalur yaitu jalur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darat dan jalur laut membutuhkan banyak dana untuk melakukan pengawasan secara langsung dikabupaten dan kecamatan karena letak KPID Riau di provinsi.

5. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi harus merevisi Peraturan Perizinan Lembaga Penyiaran. Sehingga KPID Riau bisa memberikan izin atau perpanjangan izin tidak hanya terbatas kepada Rekomendasi Kelayakan.
6. KPU Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang memfasilitasi lembaga penyiaran untuk penayangan iklan kampanye harus memfasilitasinya agar lembaga penyiaran tidak dirugikan
7. Lembaga Penyiaran harus mengetahui Peraturan-peraturan tentang penyiaran dan hal-hal yang dilarang dalam penyiaran agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.